



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan bagi seluruh instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, penilaian hasil kinerja dan transparansi serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2021 ini merupakan gambaran dari tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk menciptakan kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan yang lebih baik. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini.

Lamongan, 31 Desember 2021



KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LAMONGAN

I. SUYATMOKO, M.MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19640524 199202 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Data Umum Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian LKJIP	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	41
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

Lampiran-Lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAPPEDA Kabupaten Lamongan sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga BAPPEDA dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Lamongan, dalam melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

LKjIP Tahun 2021 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Lamongan, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang digunakan untuk menguji keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi Pemerintah, menyajikan prosentase tingkat pencapaian kinerja kegiatan (menguji keberhasilan kinerja kegiatan/program) dan prosentase tingkat pencapaian sasaran (menguji pengukuran kinerja dinas/instansi dalam menjalankan Renstra Bappeda yang berarti tugas, pokok dan fungsi Bappeda).

Rencana Kerja Bappeda pada tahun anggaran 2021, meliputi 1 (Satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran. Untuk mendukung keberhasilan tersebut telah dianggarkan plafon dana sebesar Rp. 10.183.929.980,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.815.057.102,00 atau 96,38%. Kelebihan anggaran sebesar Rp. 368.872.878,00 akan dikembalikan ke Kas Daerah. Sedangkan capaian indikator sasaran telah terealisasi dengan capaian indikator "Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik" sebesar 102% dan "Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama \geq 75%)" sebesar 99%.

Untuk mendukung tingkat keberhasilan program kerja di Bappeda Kabupaten Lamongan, upaya-upaya yang perlu lebih ditingkatkan di tahun mendatang adalah:

1. Lebih meningkatkan koordinasi antar instansi / Perangkat Daerah dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan terutama yang berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
2. Menampung dan menindaklanjuti setiap masukan/aspirasi dan kritik dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya *Good Governance* dengan menyesuaikan anggaran yang ada.

3. Lebih meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang ada terutama di bidang perencanaan pembangunan melalui Diklat teknis baik yang dilakukan di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja yang telah direncanakan sebagai upaya mitigasi terhadap hambatan yang akan terjadi.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah yang baik dan terpercaya dengan ditindaklanjuti adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD) dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, penilaian hasil kinerja dan transparansi serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 untuk disampaikan kepada Bupati. Penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Lamongan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan ber sasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mendukung Visi Bupati Kabupaten Lamongan **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”** serta menjadi pendukung pada misi ke-4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik, lebih lanjut Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

a. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah;
- 2) koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 3) koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- 4) koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah;
- 5) koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat didukung 3 (tiga) Sub Bagian, sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Program dan Evaluasi
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Umum

c. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Ekonomi dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bidang, sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Pertanian
- b. Sub Bidang Perekonomian
- c. Sub Bidang Pengembangan Usaha

d. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Fisik dan Prasarana dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bidang, sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Prasarana Wilayah
- b. Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal
- c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

e. Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Sosial dan Pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bidang, sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
- c. Sub Bidang Pemerintahan

f. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bidang, sebagai berikut:

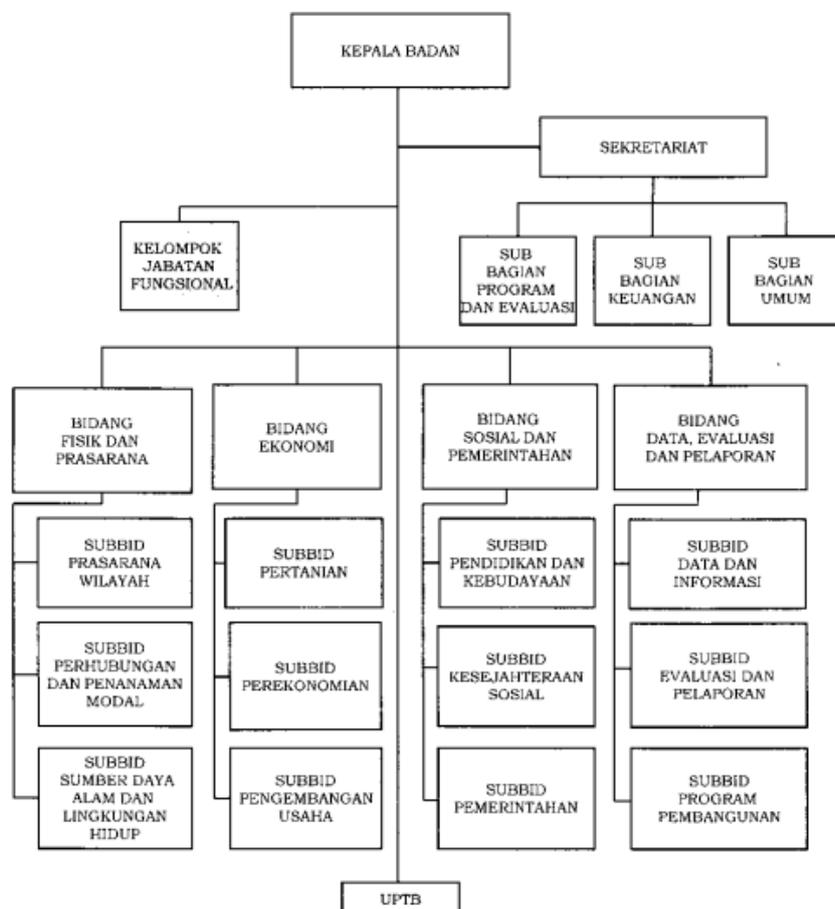
- a. Sub Bidang Data dan Informasi
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Bidang Program Pembangunan

g. UPT Badan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Lamongan Sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016

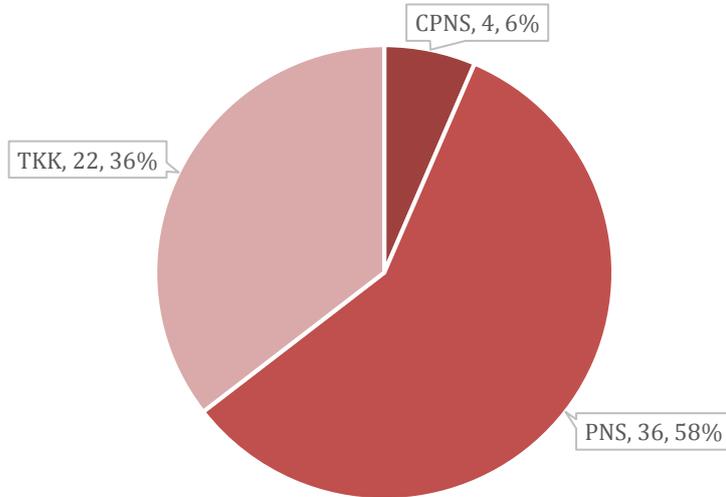


C. DATA UMUM ORGANISASI

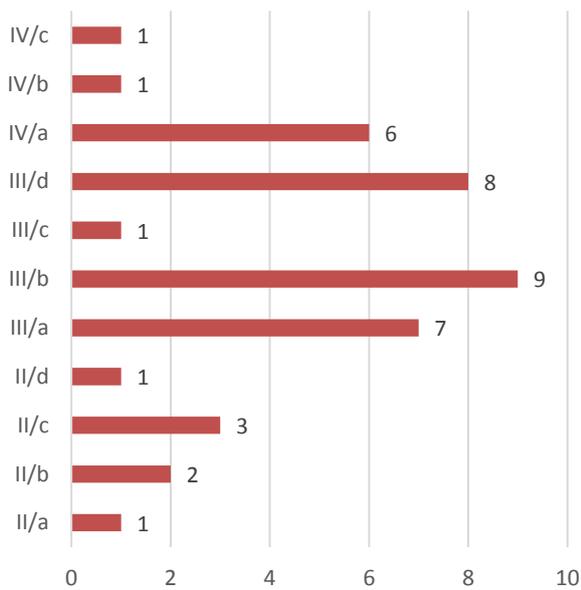
1. SUMBER DAYA MANUSIA BAPPEDA

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2021 secara singkat dipaparkan dalam informasi berikut :

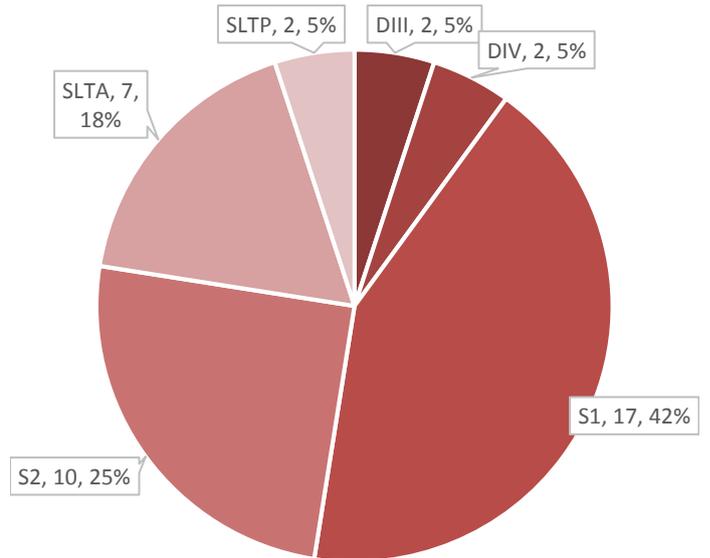
Grafik 3.1:
Data Sumber Daya Manusia
Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2021



Grafik 1.2:
Data PNS & CPNS Berdasarkan Gol./Ruang
Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2021



Grafik 1.1:
Data PNS & CPNS Berdasarkan Pendidikan
Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2021



Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Per Desember 2021

2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BAPPEDA

Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan menghadapi berbagai permasalahan dalam membuat perencanaan yang partisipatif, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan harapan stakeholder. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk monitoring capaian
- b. Penggunaan aplikasi SIPD Kemendagri yang terpusat yang sering mengalami gangguan server atau *maintenance* sehingga menghambat proses perencanaan
- c. Masih belum adanya satu data yang lengkap dan *real-time* sehingga menyebabkan proses perencanaan berjalan kurang optimal

3. ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan adalah :

- a. Penerapan system perencanaan terintegrasi berbasis aplikasi digital (SIPD) membutuhkan data dan informasi yang semakin akurat;
- b. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga perencana yang memiliki kompetensi (*skill*) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- c. Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah terkait dengan perencanaan pembangunan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Instansi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bappeda Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan 2016 – 2021 dan Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021 yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berikut tujuan, sasaran dan indikator sasaran Renstra Bappeda Tahun 2016 - 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Renstra Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				
				2017	2018	2029	2021	2021
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan selaras dan Berorientasi Hasil	Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik	-	74%	85%	94%	98%	98%
		Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama $\geq 75\%$)	-	97%	97%	98%	98%	98%

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan disusun dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijabarkan hal-hal terkait tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam tahun tersebut, termasuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Terdapat 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 51 (lima puluh satu) sub kegiatan beserta masing-masing indikator dan target yang harus dicapai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2021
(Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021)

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (RP)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	100 %	8,010,038,480
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	80,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	30,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	50,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	26 Laporan	6,740,560,480
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji Jumlah Laporan Tunjangan ASN	12 Laporan 12 Laporan	6,710,560,480
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	15,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	15,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Dan Bimbingan Teknis	1 Orang	15,080,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	70 Pakaian Olahraga	14,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Dan Bimbingan Teknis	1 Orang	1,080,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Pelayanan	427,230,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	10,000,000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (RP)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket LED Video Wall	200,950,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	26 Item	46,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Atk Jumlah Materai	23 Jenis 180 Materai	40,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan	13 Jenis 59.040 Lembar	32,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Iklan/Ucapan	13 Surat Kabar 15 Iklan	27,780,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat	360 Dus Minuman 360 Box Snack 36 Box Makanan	70,000,000
	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dan Luar Negeri	63 Kali	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang	2 Pelayanan	592,168,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Terbayarkan	2 Rekening	9,500,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga Pelayanan Kantor	7 Orang	582,668,000.00
	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	15 Orang	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	36 Item	155,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara	1 Unit Roda 4	45,000,000.00
	Jumlah Pajak Surat Kendaraan Yang Terbayarkan (Kendaraan Dinas Jabatan)	1 Unit Roda 4	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	6 Unit Roda 4	80,000,000.00
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	24 Unit Roda 2	
	Jumlah Pajak Surat Kendaraan Yang Terbayarkan (Kendaraan Dinas Operasional)	6 Unit Roda 4	
	Jumlah Pajak Surat Kendaraan Yang Terbayarkan (Kendaraan Dinas Operasional)	24 Unit Roda 2	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (RP)
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik	3 Jenis	30,000,000.00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu	100 %	970,262,100
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menyusun Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	76 Perangkat Daerah	684,666,400
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan	1 Laporan	13,157,500
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Peserta Konsultasi Publik	76 Perangkat Daerah	14,740,900
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Yang Diselenggarakan	2 Musrenbang	242,852,200
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Musrenbang Tepat Waktu	27 Kecamatan	63,915,800
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD	2 Dokumen	350,000,000
	Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dianalisis	31 Data	202,055,300
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Pendampingan Input Data-Data Pembangunan	76 Perangkat Daerah	21,992,600
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Peserta Pendampingan SIPD	50 Anggota Dewan 76 Perangkat Daerah 464 Desa	35,062,700
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1 Dokumen	145,000,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	5 Dokumen	83,540,400
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun	1 Dokumen	73,554,400
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	4 Laporan	9,986,000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	1,203,629,400
	Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik	100%	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (RP)
	(Realisasi Kinerja Utama \geq 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi		
	Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana	100%	
	Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama \geq 75 %) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana	100%	
	Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan	98%	
	Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama \geq 75 %) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan	98%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	46 Perangkat Daerah	409,770,400
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidaang Pemerintahan	105 Dokumen	19,850,800
	Jumlah Peserta Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan	105 Orang	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Pemerintahan Yang Di Asistensi	105 Dokumen	79,554,400
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Pemerintahan	70 Dokumen	25,000,000
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pemerintahan	4 Monitoring	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Pembanguna Manusia yang Diasistensi	15 Dokumen	21,926,700
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	15 Dokumen	
	Jumlah Peserta Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	65 Orang	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (RP)
	Daerah Lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Yang Di Asistensi	18 Dokumen	82,384,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia	10 Dokumen	15,696,400
	Jumlah Laporan SDG's	2 Laporan	
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evakuais Lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia	4 Monitoring	
	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Pemantapan SDGs Kabupaten Lamongan	65 Perangkat Daerah	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidangkesejahteraan Masyarakat Yang Di Asistensi	18 Dokumen	165,358,100
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kesejahteraan Masyarakat	18 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	12 Dokumen	
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidangkesejahteraan Masyarakat	4 Monitorig	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	167,448,900
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Booklet Makro Ekonomi	20 Booklet	13,748,000
	Jumlah Dokumen PDRB Menurut Pengeluaran	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen PDRB Menurut Produksi	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian	9 Dokumen	
	Jumlah Peserta Koordinasi /FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang SDA Lingkup Sub Bidang Perekonomian	36 Orang	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Perekonomian Yang Diasistensi	9 Dokumen	44,208,500

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (RP)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Perekonomian	6 Dokumen	16,499,000
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan Lingkup Sub Bidang Perekonomian	9 Dokumen	
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Perekonomian	4 Monitoring	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Ekonomi Kreatif Dan Pengembangan Usaha Yang Di Asistensi	9 Dokumen	29,940,900
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sub Bidang Ekonomi Kreatif Dan Pengembangan Usaha	9 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Ekonomi Kreatif Dan Pengembangan Usaha	6 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan	9 Dokumen	
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Ekonomi Kreatif Dan Pengembangan Usaha	4 Monitoring	
	Jumlah Peserta Kooordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	190 Orang	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sumber Daya Alam	12 Dokumen	
Jumlah Peserta Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	125 Orang		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam Yang Diasistensi	12 Dokumen	30,315,300
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Bidang SDA	8 Dokumen	14,991,700
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan	12 Dokumen	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (RP)
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Bidang SDA	4 Monitoring	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	9 Perangkat Daerah	626,410,100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur	12 Dokumen	11,157,000
	Jumlah Peserta Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Erencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur	30 Orang	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur Yang Diasistensi	18 Dokumen	43,013,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Bidang Infrastruktur	12 Dokumen	11,377,500
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Bidang Infrastruktur	4 Monitoring	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pengkajian Aspek Teknis (Infrastruktur Dan Pertanian) Sosial, Ekonomi, Perubahan Iklim Dan Kelembagaan Di Tingkat Daerah Irigasi	1 Dokumen	405,718,000
	Jumlah Peserta Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	560 Orang	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan	9 Dokumen	70,081,600
	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten	1 Dokumen	
	Jumlah Peserta Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan	90 Orang	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Kewilayahan Yang Diasistensi	9 Dokumen	15,063,000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (RP)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Bidang Kewilayahan	6 Dokumen	15,000,000
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Bidang Kewilayahan	4 Monitoring	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan	6 Dokumen	55,000,000
	Jumlah Peserta Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	30 Orang	
TOTAL			10,183,929,980

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016–2021, Dokumen Rencana Kerja tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021. Selanjutnya, dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator strategis yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 selanjutnya kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAAPEDA) Kabupaten Lamongan dengan Bupati dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Bappeda.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2021, dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras dan Berorientasi Hasil	Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik	98%
	Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama $\geq 75\%$)	98%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2021 terdiri dari 2 (dua) indikator antara lain :

1. Prosentase Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan berkualitas baik. Dimana yang diukur adalah Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2022 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dengan Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2021 serta Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.
2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama $\geq 75\%$), indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 (n-1).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

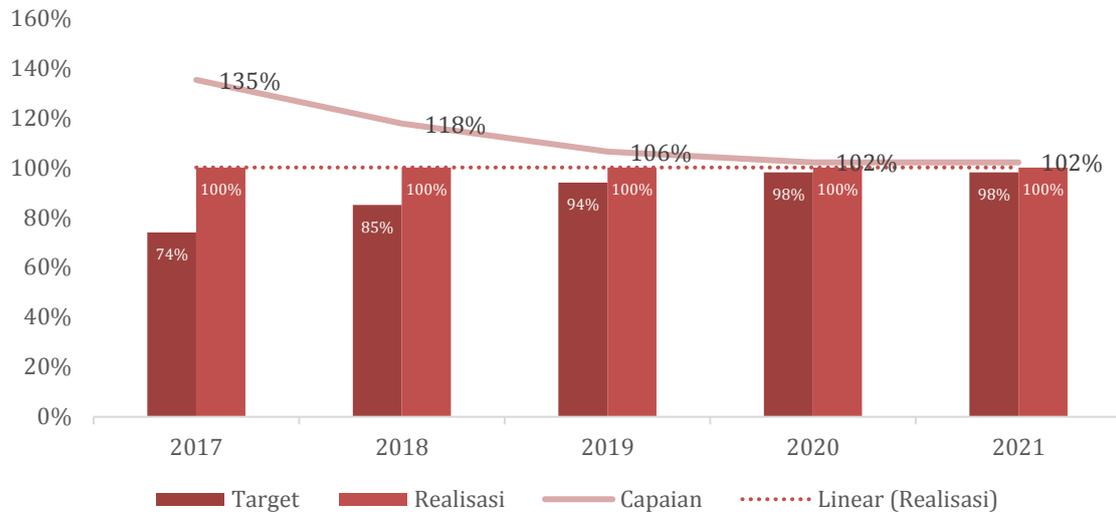
Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2021 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan dengan Bupati Kabupaten Lamongan. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Secara keseluruhan capaian kinerja Bappeda pada tahun 2021 adalah seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun 2021

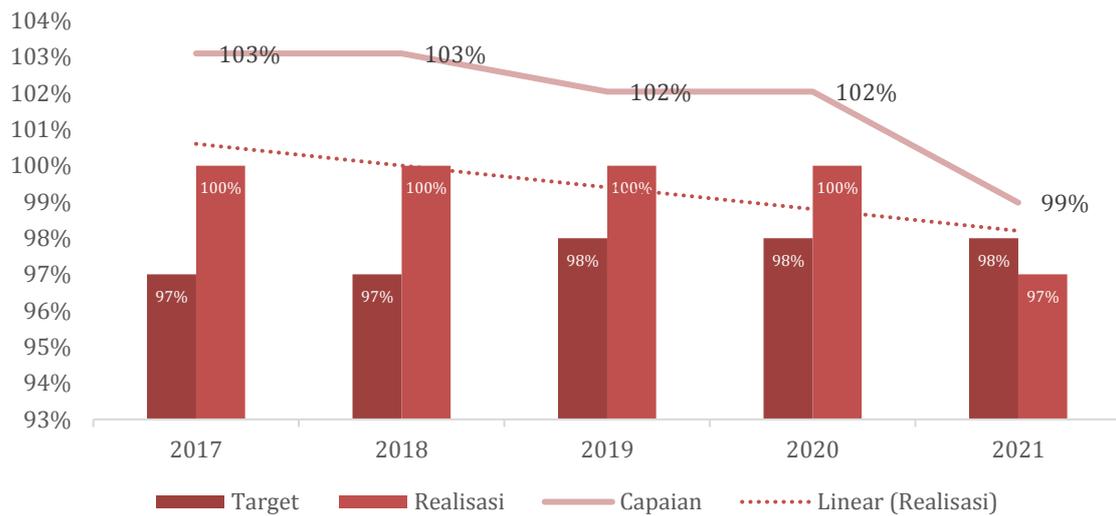
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan selaras dan Berorientasi Hasil	Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik	98%	100%	102%
	Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥75%)	98%	97%	99%

Adapun realisasi kinerja yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tahun 2021 dibandingkan target, realisasi dan capaian periode 2017-2021 (sampai dengan akhir periode RPJMD/Renstra) dapat dilihat melalui grafik berikut ini :

Grafik 3.1
Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik Tahun 2017-2021



Grafik 3.2
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama $\geq 75\%$) Tahun 2017-2021



1. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Grafik 3.1 dan Grafik 3.2, dapat dilihat pencapaian kinerja Bappeda pada Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Indikator Sasaran “Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik”

Dapat dilihat pada Grafik 3.1 menunjukkan bahwa target indikator sasaran Bappeda yang berupa “Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik” selalu terealisasi dengan baik di atas target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 indikator kinerja ini terealisasi dengan baik dengan capaian sebesar 102%. Pencapaian ini didukung dengan keluaran berupa dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selaras dengan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2022, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang selaras dengan Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- 1) Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lamongan, khususnya untuk memastikan dokumen perencanaan perangkat daerah berkualitas baik dan selaras dengan dokumen perencanaan yang ada di tingkat kabupaten seperti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 2) Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri membuat penyusunan dokumen perencanaan menjadi lebih terintegrasi sehingga Bappeda sebagai mitra perencanaan pembangunan perangkat daerah dapat terus melakukan pemantauan untuk memastikan dokumen perencanaan disusun dengan baik dan berkualitas.

b. Indikator Sasaran “Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama $\geq 75\%$)”

Dapat dilihat pada Grafik 3.2 menunjukkan bahwa target indikator sasaran Bappeda yang berupa “Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama $\geq 75\%$)” selalu terealisasi dengan baik di atas target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2021. Pada tahun 2021 indikator kinerja ini terealisasi dibawah target yang telah ditetapkan yakni 97% dengan capaian sebesar 99%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena terdapat perangkat daerah yang realisasi kinerja utamanya dibawah 75% yaitu Dinas Perpustakaan Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Faktor dominan yang

menyebabkan tidak tercapainya kinerja utama tersebut disebabkan karena adanya kondisi pandemi COVID-19 dan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2020 sehingga menyebabkan turunnya kunjungan pariwisata di Kabupaten Lamongan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Namun, terlepas dari itu, realisasi kinerja utama perangkat daerah lainnya tidak terdampak secara signifikan dengan adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan PSBB.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulan untuk memantau capaian IKU perangkat daerah maupun IKU RPJMD yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah oleh masing-masing mitra bidang di Bappeda Lamongan melalui laporan evaluasi Renja setiap triwulan
- 2) Monitoring secara langsung di lapangan untuk memastikan ketercapaian target kinerja perangkat daerah

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada Bappeda Kabupaten Lamongan memiliki 1 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama perangkat daerah (IKU PD), sehingga keseluruhan alokasi anggaran digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) terhadap capaian tujuan dan sasaran dapat dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Pagu Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Sehingga tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya Bappeda Tahun 2021 dapat diketahui seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021
Bappeda Kabupaten Lamongan

Sasaran / Indikator Kinerja	(%) Capaian Kinerja	(%) Realisasi Anggaran	(%) Tingkat Efisiensi
Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan selaras dan Berorientasi Hasil			
Indikator Sasaran:			
1. Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik	102%	96,38%	3,62%
2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama $\geq 75\%$)	99%		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Bappeda, yaitu sebesar 3,62 % dengan rincian pagu anggaran sebesar Rp. 10.183.929.980,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.815.057.102,- atau sebesar 96,38%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja utama Bappeda pada Tahun 2021 sudah cukup efisien.

3. Analisis Program dan Kegiatan

Keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan tidak dapat dilepaskan dari dukungan Program dan Kegiatan nomenklatur yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021. Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, pada tahun 2021 Bappeda Kabupaten Lamongan melaksanakan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Lamongan. Masing-masing program dan kegiatan memiliki indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam satu periode. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Program ini memiliki indikator kinerja berupa “Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu”. Pada tahun 2021 dokumen perencanaan pembangunan yang disusun adalah:

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2021
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2021
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2021
- Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2021

Penanggung jawab dari program ini adalah Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan yang mana pelaksanaan program ini didukung dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Tabel 3.3, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu” dengan target 76 Perangkat Daerah. Pada tahun 2021 dokumen perencanaan yang disusun adalah:

- Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2021,
- Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2021, dan
- Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2021.

2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Tabel 3.3, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dianalisis Jumlah Data dan Informasi

Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dianalisis” dengan target 31 data. Pada tahun 2021 Bappeda Kabupaten Lamongan menyusun 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan yang mana data dan informasi yang dianalisis dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Adapun 31 data dan informasi tersebut meliputi data urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Data tersebut kemudian dijadikan sebagai basis data dalam program Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan.

3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Tabel 3.3, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan” dengan target 5 dokumen. Pada tahun 2021 dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun adalah:

- Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2021
- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun 2020
- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2021
- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2021
- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan III Tahun 2021

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Tahun 2021
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Lamongan

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu	100 %	100%	100%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menyusun Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	76 Perangkat Daerah	76 Perangkat Daerah	100%
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Peserta Konsultasi Publik	76 Perangkat Daerah	76 Perangkat Daerah	100%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Yang Diselenggarakan	2 Musrenbang	2 Musrenbang	100%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Musrenbang Tepat Waktu	27 Kecamatan	27 Kecamatan	100%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dianalisis	31 Data	31 Data	100%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Pendampingan Input Data-Data Pembangunan	76 Perangkat Daerah	76 Perangkat Daerah	100%
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Peserta Pendampingan SIPD	50 Anggota Dewan 76 Perangkat Daerah 464 Desa	50 Anggota Dewan 76 Perangkat Daerah 464 Desa	100%
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	100%

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Program ini memiliki 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi
- Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
- Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana
- Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
- Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan

Penanggung jawab dari program ini adalah Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Prasaran serta Bidang Sosial dan Pembangunan yang bertanggung jawab pada capaian indikator kinerja di lingkup bidangnya masing-masing. Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2021 sesuai dengan Tabel 3.4 adalah sebagai berikut:

- Indikator Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan realisasi sebesar 100% yakni dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang terdiri dari Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 lingkup bidang ekonomi yang selaras dengan RKPD Tahun 2022, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 lingkup bidang ekonomi yang selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2021 serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 lingkup bidang ekonomi yang selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026.
- Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi yang mana indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 (n-1). Pada tahun 2020 realisasi target indikator prosentase perangkat daerah yang capaian kinerjanya baik lingkup bidang ekonomi (realisasi kinerja utama ≥ 75 %) sebesar 90% di bawah target yang telah ditetapkan yang terealisasi di Triwulan I. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan terdapat 1 (satu) perangkat daerah yang realisasi capaian kinerjanya kurang dari 75% yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang disebabkan karena adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang berakibat pada menurunnya kunjungan masyarakat ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Lamongan.
- Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana dengan realisasi sebesar 100% yakni dokumen perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang terdiri dari Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 lingkup bidang fisik dan prasarana yang selaras dengan RKPD Tahun 2022, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 lingkup bidang fisik dan prasarana yang selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2021 serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 lingkup bidang fisik dan prasarana yang selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026.
- Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana yang mana indikator ini

dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 (n-1). Pada tahun 2020 realisasi target indikator prosentase perangkat daerah yang capaian kinerjanya baik lingkup bidang fisik dan prasarana (realisasi kinerja utama $\geq 75\%$) sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang terealisasi di Triwulan I.

- Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan dengan realisasi sebesar 100% yakni dokumen perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang terdiri dari Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang selaras dengan RKPDP Tahun 2022, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang selaras dengan Perubahan RKPDP Tahun 2021 serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026.
- Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama $\geq 75\%$) Lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan yang mana indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 (n-1). Pada tahun 2020 realisasi target indikator prosentase perangkat daerah yang capaian kinerjanya baik lingkup bidang sosial dan pemerintahan (realisasi kinerja utama $\geq 75\%$) sebesar 98% di bawah target yang telah ditetapkan yang terealisasi di Triwulan I. Target tersebut tidak terealisasi sebesar 100% dikarenakan terdapat 1 (satu) perangkat daerah yang realisasi capaian kinerjanya kurang dari 75% yaitu Dinas Perpustakaan Daerah, yang disebabkan karena adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang berakibat pada menurunnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang ada di Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan program ini di dukung melalui 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang terkait, yaitu:

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mendukung pencapaian indikator “Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”. Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Bidang Sosial dan Pemerintahan. Sesuai dengan Tabel 3.4, indikator kinerja dari program ini adalah “Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan target 46 Perangkat Daerah lingkup bidang sosial dan pemerintahan, yaitu:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ▪ Dinas Pendidikan | ▪ Kecamatan Sukorame |
| ▪ Dinas Perpustakaan Daerah | ▪ Kecamatan Bluluk |
| ▪ Dinas Kearsipan Daerah | ▪ Kecamatan Modo |
| ▪ Dinas Pemuda Dan Olahraga | ▪ Kecamatan Ngimbang |
| ▪ Badan Kepegawaian Daerah | ▪ Kecamatan Babat |

- Dinas Kesehatan
- Dinas Sosial
- Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- RSUD Dr. Soegiri
- RSUD Ngimbang
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- Satuan Polisi Pamong Praja Inspektorat
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Kecamatan Kedungpring
- Kecamatan Brondong
- Kecamatan Laren
- Kecamatan Sekaran
- Kecamatan Maduran
- Kecamatan Sambeng
- Kecamatan Sugio
- Kecamatan Pucuk
- Kecamatan Paciran
- Kecamatan Solokuro
- Kecamatan Mantup
- Kecamatan Sukodadi
- Kecamatan Karanggeneng
- Kecamatan Kembangbahu
- Kecamatan Kalitengah
- Kecamatan Turi
- Kecamatan Lamongan
- Kecamatan Tikung
- Kecamatan Karangbinangun
- Kecamatan Deket
- Kecamatan Galagah
- Kecamatan Sarirejo

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) mendukung pencapaian indikator “Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”. Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Bidang Ekonomi. Sesuai dengan Tabel 3.4, indikator kinerja dari program ini adalah “Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)” dengan target 10 Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi, yaitu:

- Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- Dinas Perikanan
- Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Dan Perkebunan
- Dinas Tenaga Kerja
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah

- Badan Pendapatan Daerah

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mendukung pencapaian indikator “Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”. Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Bidang Fisik dan Prasarana. Sesuai dengan Tabel 3.4, indikator kinerja dari program ini adalah “Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan” dengan target 9 Perangkat Daerah lingkup bidang fisik dan prasarana, yaitu:

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Komunikasi Dan Informatika
- Dinas Perhubungan
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Tahun 2021

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lamongan

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	100%	100%
	Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama \geq 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi	100%	90%	90%
	Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana	100%	100%	100%
	Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama \geq 75 %) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana	100%	100%	100%
	Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan	98%	100%	102%
	Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik	98%	98%	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	(Realisasi Kinerja Utama \geq 75 %) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	46 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidaang Pemerintahan	105 Dokumen	105 Dokumen	100%
	Jumlah Peserta Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan	105 Orang	105 Orang	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Pemerintahan Yang Di Asistensi	105 Dokumen	105 Dokumen	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Pemerintahan	70 Dokumen	70 Dokumen	100%
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pemerintahan	4 Monitoring	4 Monitoring	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Pembanguna Manusia yang Diasistensi	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
	Jumlah Peserta Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia	65 Orang	65 Orang	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Yang Di Asistensi	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
	Jumlah Laporan SDG's	2 Laporan	2 Laporan	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evakuais Lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia	4 Monitoring	4 Monitoring	100%
Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Pemantapan SDGs Kabupaten Lamongan	65 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidangkesjahteraan Masyarakat Yang Di Asistensi	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kesejahteraan Masyarakat	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidangkesejahteraan Masyarakat	4 Monitorig	4 Monitorig	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidangperekonomian (RPJPD, RPJMD, Dan RKPDP)	Jumlah Booklet Makro Ekonomi	20 Booklet	20 Booklet	100%
	Jumlah Dokumen PDRB Menurut Pengeluaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen PDRB Menurut Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Jumlah Peserta Koordinasi /FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang SDA Lingkup Sub Bidang Perekonomian	36 Orang	36 Orang	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Perekonomian Yang Diasistensi	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Perekonomian	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan Lingkup Sub Bidang Perekonomian	9 Dokumen	9 Dokumen	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Perekonomian	4 Monitoring	4 Monitoring	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Ekonomi Kreatif Dan Pengembangan Usaha Yang Di Asistensi	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sub Bidang Ekonomi Kreatif Dan Pengembangan Usaha	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Sub Bidang Ekonomi Kreatif Dan Pengembangan Usaha	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Ekonomi Kreatif Dan Pengembangan Usaha	4 Monitoring	4 Monitoring	100%
	Jumlah Peserta Kooordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	190 Orang	170 Orang	90%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sumber Daya Alam	12 Dokumen	12 Dokumen
Jumlah Peserta Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		125 Orang	92 Orang	74%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam Yang Diasistensi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Bidang SDA	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Bidang SDA	4 Monitoring	4 Monitoring	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Jumlah Peserta Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Erencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur	30 Orang	30 Orang	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur Yang Diasistensi	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Bidang Infrastruktur	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Bidang Infrastruktur	4 Monitoring	4 Monitoring	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pengkajian Aspek Teknis (Infrastruktur Dan Pertanian) Sosial, Ekonomi, Perubahan Iklim Dan Kelembagaan Di Tingkat Daerah Irigasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Jumlah Peserta Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	560 Orang	350 Orang	62,5%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Jumlah Peserta Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan	90 Orang	90 Orang	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Kewilayahan Yang Diasistensi	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dievaluasi Lingkup Bidang Kewilayahan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Bidang Kewilayahan	4 Monitoring	4 Monitoring	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Jumlah Peserta Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	30 Orang	30 Orang	100%

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Program ini memiliki 1 (enam) indikator kinerja yaitu “Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu” dengan target 100%. Pada tahun 2021, program ini menghasilkan keluaran berupa:

- Dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022
- Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021
- Dokumen Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2021-2026
- Dokumen RKA Bappelitbangda Tahun 2022
- Dokumen LKPJ Bappeda Tahun 2020
- Dokumen LPPD Bappeda Tahun 2020
- Dokumen LKjIP Bappeda Tahun 2020
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2020
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021
- Dokumen Evaluasi PMPRB Bappeda Tahun 2021
- Dokumen Laporan Gaji Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021
- Dokumen Laporan Tunjangan ASN Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021
- Dokumen Laporan Akhir Tahun 2021
- Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2021

Penanggung jawab dari program ini adalah Sekretariat Bappeda Lamongan yang mana pelaksanaan program ini didukung dengan 6 (enam) kegiatan, yaitu:

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.5, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu”. Pada tahun 2021 kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan keluaran berupa dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sebanyak 12 Dokumen, yaitu:

- Dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022
- Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021
- Dokumen Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2021-2026
- Dokumen RKA Bappelitbangda Tahun 2022
- Dokumen LKPJ Bappeda Tahun 2020
- Dokumen LPPD Bappeda Tahun 2020
- Dokumen LKjIP Bappeda Tahun 2020
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2020
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021
- Dokumen Evaluasi PMPRB Bappeda Tahun 2021

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.5, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu”. Pada tahun 2021 kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan keluaran berupa dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sebanyak 26 Laporan, yaitu:

- Dokumen Laporan Gaji Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) Laporan
- Dokumen Laporan Tunjangan ASN Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) Laporan
- Dokumen Laporan Akhir Tahun 2021
- Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2021

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.5, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah Peserta Pelatihan Dan Bimbingan Teknis”. Pada tahun 2021 kegiatan ini terealisasi 100% dengan jumlah peserta

pelatihan dan bimbingan teknis sebanyak 1 Orang. Terdapat pergeseran target pada kegiatan ini dikarenakan adanya kebijakan refocussing anggaran.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.5, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah”. Pada tahun 2021 kegiatan ini telah 100% dengan jumlah pelayanan yang ada sebanyak 7 pelayanan sesuai dengan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini, yaitu:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.5, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang”. Pada tahun 2021 kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan jumlah pelayanan yang ada sebanyak 2 pelayanan sesuai dengan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini, yaitu:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan keluaran sejumlah 2 rekening yang terbayarkan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan keluaran sejumlah 22 tenaga pelayanan dan administrasi

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.5, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara”. Pada tahun 2021 kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan jumlah item yang dipelihara sebanyak 36 item yang meliputi:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda Kabupaten Lamongan

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	100 %	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	26 Laporan	26 Laporan	100%
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Jumlah Laporan Tunjangan ASN	12 Laporan	12 Laporan	100%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Dan Bimbingan Teknis	1 Orang	1 Orang	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	70 Pakaian Olaharag	70 Pakaian Olaharag	100%
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Dan Bimbingan Teknis	1 Orang	1 Orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Pelayanan	7 Pelayanan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	100%
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket LED Video Wall	1 Paket LED Video Wall	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	26 Item	26 Item	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Atk Jumlah Materai	23 Jenis 180 Materai	23 Jenis 180 Materai	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan	13 Jenis 59.040 Lembar	13 Jenis 87.745 Lembar	100% 149%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Iklan/Ucapan Jumlah Bahan Bacaan Dan Iklan/Ucapan	13 Surat Kabar 15 Iklan	13 Surat Kabar 15 Iklan	100% 100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat	360 Dus Minuman 360 Box Snack 36 Box Makanan	360 Dus Minuman 360 Box Snack 36 Box Makanan	100%
	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dan Luar Negeri	63 Kali	63 Kali	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang	2 Pelayanan	2 Pelayanan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Terbayarkan	2 Rekening	2 Rekening	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga Pelayanan Kantor Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	7 Orang 15 Orang	7 Orang 15 Orang	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	36 Item	36 Item	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara Jumlah Pajak Surat Kendaraan Yang Terbayarkan (Kendaraan Dinas Jabatan)	1 Unit Roda 4 1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4 1 Unit Roda 4	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	6 Unit Roda 4	6 Unit Roda 4	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	24 Unit Roda 2	24 Unit Roda 2	100%
	Jumlah Pajak Surat Kendaraan Yang Terbayarkan (Kendaraan Dinas Operasional)	6 Unit Roda 4	6 Unit Roda 4	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah Pajak Surat Kendaraan Yang Terbayarkan (Kendaraan Dinas Operasional)	24 Unit Roda 2	24 Unit Roda 2	100%
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik	3 Jenis	3 Jenis	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD 2021, pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Bappeda Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip penganggaran.

Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran Bappeda Lamongan pada tahun 2021 seperti yang tersaji pada Tabel 3.6:

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Bappeda Kabupaten Lamongan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,010,038,480.00	7,844,211,363.00	97.93%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000.00	79,799,500.00	99.75%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	49,799,500.00	99.60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,740,560,480.00	6,692,080,142.00	99.28%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,710,560,480.00	6,662,080,242.00	99.28%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,000,000.00	14,999,900.00	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,080,000.00	15,080,000.00	100.00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	427,230,000.00	424,474,626.00	99.36%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	9,995,500.00	99.96%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,950,000.00	198,741,900.00	98.90%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46,000,000.00	45,998,800.00	100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32,500,000.00	32,500,000.00	100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27,780,000.00	27,690,000.00	99.68%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,000,000.00	69,548,426.00	99.35%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592,168,000.00	479,726,052.00	81.01%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,500,000.00	4,061,770.00	42.76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582,668,000.00	475,664,282.00	81.64%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155,000,000.00	153,051,043.00	98.74%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,000,000.00	44,944,310.00	99.88%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,000,000.00	78,123,633.00	97.65%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	29,983,100.00	99.94%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	970,262,100.00	966,467,600.00	99.61%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	684,666,400.00	683,776,500.00	99.87%
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	13,157,500.00	12,830,000.00	97.51%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	14,740,900.00	14,740,900.00	100.00%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	242,852,200.00	242,852,200.00	100.00%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	63,915,800.00	63,915,800.00	100.00%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	350,000,000.00	349,437,600.00	99.84%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	202,055,300.00	201,078,300.00	99.52%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	21,992,600.00	21,562,400.00	98.04%
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	35,062,700.00	34,629,500.00	98.76%
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	145,000,000.00	144,886,400.00	99.92%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	83,540,400.00	81,612,800.00	97.69%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	73,554,400.00	73,554,400.00	100.00%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	9,986,000.00	8,058,400.00	80.70%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,203,629,400.00	1,004,378,139.00	83.45%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	409,770,400.00	394,906,600.00	96.37%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19,850,800.00	19,250,700.00	96.98%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	79,554,400.00	79,546,900.00	99.99%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25,000,000.00	24,993,300.00	99.97%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21,926,700.00	13,973,500.00	63.73%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82,384,000.00	82,383,900.00	100.00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15,696,400.00	9,657,300.00	61.53%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	165,358,100.00	165,101,000.00	99.84%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	167,448,900.00	162,435,100.00	97.01%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13,748,000.00	13,319,600.00	96.88%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44,208,500.00	42,708,700.00	96.61%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16,499,000.00	15,642,200.00	94.81%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	29,940,900.00	29,530,500.00	98.63%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17,745,500.00	15,927,200.00	89.75%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,315,300.00	30,315,200.00	100.00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14,991,700.00	14,991,700.00	100.00%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	626,410,100.00	447,036,439.00	71.36%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,157,000.00	8,733,000.00	78.27%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	43,013,000.00	40,133,000.00	93.30%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11,377,500.00	8,817,400.00	77.50%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	405,718,000.00	238,316,639.00	58.74%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70,081,600.00	68,416,100.00	97.62%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15,063,000.00	14,982,900.00	99.47%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	15,000,000.00	12,757,400.00	85.05%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	55,000,000.00	54,880,000.00	99.78%
Jumlah	10,183,929,980.00	9,815,057,102.00	96.38%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pagu anggaran Bappeda Lamongan Tahun 2021 berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 10.183.929.980,00 dengan total realisasi sebesar Rp. 9.815.057.102,00 atau sebesar 96,38% penyerapan dari pagu anggaran. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 368.872.878,00 yang dikembalikan ke kas daerah.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yang dituangkan menjadi 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan faktor sebagai berikut :

1. Indikator Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik mempunyai titik berat perhatian pada proses penyusunan dokumen perencanaan;
2. Indikator Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama $\geq 75\%$) mempunyai titik berat pada capaian kinerja RPJMD dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Sebagai bahan penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparaturnegara, masyarakat dan dunia usaha sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamongan. Upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan lebih baik di tahun mendatang adalah dalam bentuk :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur;
2. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
3. Meningkatkan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Kabupaten Lamongan;
4. Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data di dalam dokumen LKjIP;
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintah khususnya di Bappeda Kabupaten Lamongan dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyusunan laporan tahun berikutnya.

Lamongan, 31 Desember 2021

 **KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LAMONGAN**
SUYATMOKO, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640524 199202 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SUYATMOKO, M.MA.**
Jabatan : **Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FADELI, SH., MM.**
Jabatan : **Bupati Lamongan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2021

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

FADELI, SH., MM.

**PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

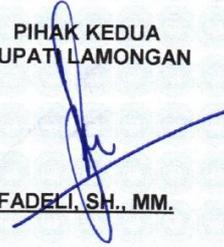
Ir. SUYATMOKO, M.MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640524 199202 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil	1. Presentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik	98%
		2. Presentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama \geq 75 %)	98%

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.410.039.400,-
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.477.500.000,-
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.678.218.000,-

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN


FADELI, SH., MM.

Lamongan, Januari 2021

PIHAK PERTAMA
PIT. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN


Ir. SUYATMOKO, M.MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640524 199202 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ir. SUYATMOKO, M.MA
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA
Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Oktober 2021

Pihak Kedua,
BUPATI LAMONGAN

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LAMONGAN**

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA


Ir. SUYATMOKO, M.MA
Pembina Ujama Muda
NIP. 19640524 199202 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

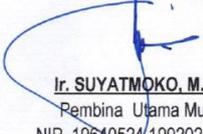
NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil	Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik	98%
		Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama \geq 75%)	98%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.010.038.480,00	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 970.262.100,00	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.203.629.400,00	APBD

BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA

Lamongan, Oktober 2021
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LAMONGAN


Ir. SUYATMOKO, M.M.A
Pembina Utama Muda
NIP. 196405241992021001

DAFTAR PENGHARGAAN BAPPEDA TAHUN 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Juara 1 Smart Office Kategori Eselon II	Bupati Lamongan
2	Juara 3 Lamongan Green Office/K3L	Bupati Lamongan



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021